



Peran Pemerintah Daerah Grobogan dalam Penguatan Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Rifaatun Miladina^{1*}

Universitas Logistik Bisnis Indonesia, Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rmiladina@gmail.com

Abstract. *The agricultural sector is a strategic pillar of Grobogan Regency's economy; however, this significant potential has not fully improved farmers' welfare. The Farmer Exchange Rate (NTP) decreased from 110.12 in 2023 to 106.85 in 2024, indicating weakening purchasing power due to rising fertilizer and transportation costs without being offset by commodity selling prices. This situation underscores the need for local government policies focused on increasing the NTP above 110 to achieve sustainable farmer welfare. This study aims to analyze the role of the Grobogan Regency Government in strengthening the agricultural sector as the main driver of local community welfare. The research employed a qualitative policy approach with a descriptive case study strategy, using triangulation of interviews, field observations, and review of policy documents such as the Grobogan RPJMD 2021–2026 and the 2024 Agriculture Office annual report. The results show that local government initiatives, such as irrigation network rehabilitation with a budget of IDR 32.5 billion, farmer group empowerment through the Climate Field School Program and Gapoktan strengthening, as well as demonstration plots of superior seed innovations, contributed to a 2.3% increase in rice productivity and a 7% increase in farmers' income. However, challenges remain regarding budget limitations and cross-sector coordination. In conclusion, strengthening policy integration, technological innovation, and multi-stakeholder collaboration are key to enabling the agricultural sector to genuinely enhance community welfare inclusively and sustainably in Grobogan Regency.*

Keywords: *Agricultural Sector; Farmer Welfare; Policy Integration; Technological Innovation; Multi-Stakeholder Collaboration.*

Abstrak. Sektor pertanian merupakan pilar strategis perekonomian Kabupaten Grobogan, namun potensi besar tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menurun dari 110,12 pada 2023 menjadi 106,85 pada 2024, menunjukkan melemahnya daya beli akibat kenaikan biaya pupuk dan transportasi tanpa diimbangi harga jual hasil panen. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pemerintah daerah difokuskan pada peningkatan NTP di atas angka 110 agar kesejahteraan petani tercapai secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif kebijakan dengan strategi studi kasus deskriptif, melalui triangulasi wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan seperti RPJMD Grobogan 2021–2026 serta laporan tahunan Dinas Pertanian 2024. Hasil penelitian menunjukkan inisiatif pemerintah daerah, seperti rehabilitasi jaringan irigasi dengan anggaran Rp32,5 miliar, pemberdayaan kelompok tani melalui Program Sekolah Lapang Iklim dan Penguatan Gapoktan, serta demplot inovasi benih unggul, berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 2,3% dan pendapatan petani 7%. Namun, tantangan masih ada dalam keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor. Kesimpulannya, penguatan integrasi kebijakan, inovasi teknologi, dan kolaborasi multi-pihak menjadi kunci agar sektor pertanian benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Kata kunci: Kebijakan Pertanian; Kesejahteraan Petani; Nilai Tukar Petani; Inovasi Teknologi; Kolaborasi Multi-Pihak.

1. PENDAHULUAN

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 11,43 persen atau sekitar 159 ribu orang, menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,72 persen atau 162,52 ribu orang (Hutabarat et al., 2023). Namun demikian, Garis Kemiskinan meningkat dari Rp464.614 menjadi Rp489.208 per kapita per bulan, menunjukkan naiknya kebutuhan hidup minimum (Putra, 2023). Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

naik dari 1,48 menjadi 1,90, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,28 menjadi 0,43, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan dan kerentanan ekonomi di kalangan penduduk miskin (K. Saputri & Udjianto, 2023). Dengan demikian, meskipun angka kemiskinan menurun secara persentase, kualitas kesejahteraan masyarakat miskin di Grobogan masih menghadapi tantangan serius.

Sebagai kabupaten dengan luas wilayah 2.023,85 km² dan lahan pertanian sekitar 83.833 hektare, Grobogan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian (Eshteiwiy, 2025). Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar 43,6%, menjadikannya sektor utama yang strategis (Agustina & Yahya, 2022). Struktur tanah yang subur dan ketersediaan lahan luas merupakan modal penting bagi pengembangan pertanian berkelanjutan (Affandi & Marpaung, 2023). Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih adanya tingkat pengangguran dan rendahnya inovasi pertanian di tingkat lokal (Rafi et al., 2022). Meskipun kebijakan pertanian daerah Grobogan telah disusun selaras dengan arah RPJMD 2021–2026 dan Renstra Dinas Pertanian 2023, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara target dan realisasi. Misalnya, program *Optimalisasi Lahan Pertanian Berkelanjutan* hanya terealisasi 62% dari target 5.000 hektare (BPS Grobogan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi dari efektivitas pelaksanaan di lapangan, koordinasi antarsektor, dan transparansi penggunaan anggaran (Prawoto & Basuki, 2022; Saputri & Rahmawati, 2022).

Sektor pertanian telah lama diakui sebagai sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Sacramento, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan pangan nasional (Todaro & Smith, 2020; FAO, 2022). Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan kelompok tani, dan pengembangan program berbasis inovasi (Suryana et al., 2021; Rahman & Hidayat, 2023). Namun demikian, kajian empiris yang secara spesifik menelaah peran pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian di wilayah dengan potensi agraris besar seperti Kabupaten Grobogan masih sangat terbatas (Ariyanto, 2022). Sebagian besar literatur yang ada lebih menyoroti aspek teknis produksi pertanian, seperti peningkatan hasil panen atau efisiensi penggunaan lahan, dan belum banyak mengkaji dimensi

tata kelola kelembagaan, koherensi kebijakan, serta intervensi pemerintah daerah sebagai faktor penentu keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat (Ediwijoyo, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan perspektif tata kelola daerah dengan kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat mentransformasikan potensi pertanian menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata (Serrano et al., 2021).

Paradigma analisis dalam penelitian ini berlandaskan pada teori *governance and local development* yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dan peran pemerintah daerah dalam menggerakkan pembangunan sektor strategis, termasuk pertanian (Zink et al., 2022). Pemerintah daerah dipandang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menciptakan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi local (Arifiyanti et al., 2023). Selain itu, pendekatan *institutional theory* digunakan untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan, norma, serta praktik birokrasi daerah memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pertanian (Ebenezer, 2022). Perspektif ini kemudian diperkuat dengan kerangka *sustainable development* yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan pertanian (Jaishi et al., 2023). Dengan demikian, analisis ini memungkinkan identifikasi sejauh mana integrasi kebijakan daerah dan kolaborasi multi-pihak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketimpangan antara potensi besar sektor pertanian di Kabupaten Grobogan dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata 106,85 pada 2024, serta pendapatan bersih petani padi hanya Rp1,8 juta per hektare per musim. Indikator ini menggambarkan bahwa peningkatan PDRB daerah belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan riil petani Grobogan. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, pasar, dan dukungan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan pertanian daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana peran pemerintah daerah Grobogan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor penghambat efektivitas kebijakan, dinamika

kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peluang penguatan tata kelola pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi efektivitas kebijakan dan program pertanian daerah, menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi strategis berbasis tata kelola dan inovasi pertanian berkelanjutan yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian tata kelola pembangunan daerah berbasis pertanian berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana *local governance* dengan menyoroti peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam transformasi sektor pertanian menuju kesejahteraan inklusif. Dari sisi empiris, hasil penelitian ini memberikan bukti kontekstual mengenai efektivitas kebijakan pertanian daerah di Kabupaten Grobogan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak, inovasi kelembagaan, serta perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Brundtland, 1987). Prinsip ini menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Salih, 2003). Dalam konteks pertanian, teori ini relevan karena sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang juga sangat bergantung pada kelestarian sumber daya alam (Farias, 2020; Rudevskaya et al., 2022). Pembangunan pertanian yang berkelanjutan menuntut adanya kebijakan yang adaptif, teknologi ramah lingkungan, serta tata kelola yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi petani (Pretty, 2008).

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, penerapan teori pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk mengelola lahan pertanian secara efisien sambil menjaga daya dukung ekosistem. Sebagai daerah dengan lahan subur dan produksi pangan tinggi, Grobogan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan produktivitas dengan konservasi lahan dan air. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan analitis untuk menilai sejauh mana

kebijakan pemerintah daerah dalam sektor pertanian tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Teori peran pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah lokal memiliki fungsi utama dalam mendorong pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya (Rondinelli, 1993). Dalam paradigma *governance*, efektivitas pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal melalui koordinasi lintas sektor (Pierre & Peters, 2000). Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan berbasis potensi daerah.

Dalam konteks Grobogan, teori ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berperan aktif dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur irigasi, subsidi sarana produksi, pembinaan kelompok tani, hingga kolaborasi dengan BUMN seperti Bulog. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pertanian yang efektif akan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan menggunakan kerangka teori *local governance*, penelitian ini dapat mengidentifikasi kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan, dan kualitas sinergi antaraktor dalam mendukung sektor pertanian berkelanjutan di Grobogan.

Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory)

Teori kesejahteraan sosial menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui distribusi sumber daya yang adil dan kebijakan yang inklusif (Esping-Andersen, 1990). Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, teori ini relevan untuk menganalisis hubungan antara peningkatan sektor pertanian dengan kesejahteraan masyarakat petani. Meskipun kontribusi pertanian terhadap PDRB cukup besar, sebagian petani masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan ekonomi. Dengan perspektif teori kesejahteraan sosial, penelitian ini menelaah bagaimana intervensi kebijakan daerah, seperti stabilisasi harga melalui Bulog dan pemberdayaan petani, dapat menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan menganalisis secara komprehensif peran pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan pertanian di tingkat daerah. Data dikumpulkan melalui kombinasi data primer dan sekunder untuk menghasilkan analisis yang valid dan komprehensif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang terdiri atas ketua kelompok tani (gapoktan), pelaku usaha pertanian, serta masyarakat petani di beberapa kecamatan strategis, seperti Wirosari, Godong, dan Toroh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan*, laporan tahunan Dinas Pertanian dan Perdagangan, publikasi resmi *Bulog.co.id*, serta data dari situs pemerintah daerah.

Proses pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap isu penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta data dokumen resmi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan: (1) transkripsi dan pengorganisasian data, (2) pengkodean awal untuk menemukan pola tematik, (3) pengelompokan tema berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat, serta (4) penarikan makna substantif yang dikaitkan dengan kerangka teori *governance and local development*, *institutional theory*, dan *sustainable agriculture*. Hasil analisis diinterpretasikan secara naratif dan komparatif untuk mengungkap hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, efektivitas program pertanian, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan petani lokal. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan realitas empiris di Grobogan, tetapi juga memberikan landasan teoretis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara praktis dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan di tingkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Produksi vs Hasil Produksi

Kabupaten Grobogan, dengan luas wilayah $\pm 2.023,84 \text{ km}^2$ dan populasi sekitar 1.506.374 jiwa pada pertengahan 2024, menduduki peringkat kedua sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah (Grobogan Regency) (Garcia, 2020). Sebagai daerah agraris dengan bentang wilayah relatif datar, Grobogan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian. Data sektor usaha PDRB menunjukkan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu kontributor utama terhadap perekonomian daerah dengan pertumbuhan positif sebesar 3,31 % pada tahun 2024 (Khristanto et al., 2023). Kondisi geografis dan karakteristik tanah yang subur memperkuat posisi Grobogan sebagai daerah dengan peluang agraris. Namun, potensi itu belum sepenuhnya tereksplorasi secara optimal untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara merata (Iswahyudi, 2020).

Menurut hasil Sensus Pertanian 2023 untuk Kabupaten Grobogan, data usaha pertanian perorangan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (Khristanto et al., 2023). Di antara tanaman pangan, Grobogan tercatat sebagai salah satu daerah penghasil besar terutama komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai. Bahkan dalam inovasi pertanian presisi, Grobogan sempat berada pada posisi nasional yang menonjol dalam produksi jagung dan kedelai. Meski demikian, distribusi hasil antara kelompok petani dan efektivitas pemanfaatan intervensi kebijakan daerah masih menunjukkan disparitas yang signifikan (Nuraini et al., 2023). Kelembagaan pertanian lokal, seperti kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), memainkan peran penting namun kapasitasnya belum merata di seluruh desa.

Analisis biaya produksi menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Grobogan menghadapi tekanan tinggi dari meningkatnya biaya input utama seperti pupuk, benih, pestisida, serta tenaga kerja. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata di lapangan (Chanifah, Darwanto, et al., 2020). Berdasarkan wawancara dengan Rumin, seorang petani padi berusia 47 tahun dari Kecamatan Pulokulan, terungkap bahwa biaya produksi untuk satu hektare lahan dapat mencapai lebih dari Rp2 juta hanya untuk pupuk dan pestisida, belum termasuk biaya tenaga kerja dan sewa mesin panen. Sementara itu, harga jual gabah pada saat panen raya hanya berkisar Rp5.000 per kilogram, bahkan lebih rendah jika dijual kepada tengkulak. Ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual ini membuat margin keuntungan petani menjadi sangat tipis, bahkan cenderung negatif.

“Sekarang biaya pupuk mahal, Mas. Satu sak pupuk subsidi saja sering susah didapat, akhirnya beli non-subsidi. Kalau dihitung, untuk satu hektare bisa keluar lebih dari dua juta, belum tenaga kerja dan sewa mesin panen. Tapi waktu panen, harga gabah cuma sekitar lima ribuan per kilo. Kadang malah di bawah itu kalau tengkulak yang ambil.”

Kondisi serupa dialami oleh Sriyanto, petani jagung dan kedelai berusia 52 tahun dari Kecamatan Tawangharjo. Ia menyampaikan bahwa meskipun hasil panen cukup stabil secara volume, kenaikan harga benih, pestisida, dan biaya tenaga kerja membuat keuntungan bersih menjadi sangat kecil.

“Harga benih sama obat pertanian naik terus, tapi harga jual jagung tidak pernah ikut naik. Waktu panen, harga malah anjlok karena stok banyak dan pembeli cuma itu-itu saja. Kami ini yang rugi, karena semua biaya sudah keluar di awal musim tanam,” ujarnya. Sriyanto menambahkan bahwa minimnya dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah dan terbatasnya peran Bulog dalam menyerap hasil produksi menyebabkan petani semakin bergantung pada tengkulak. Menurutnya, jika Bulog mampu membeli hasil panen dengan harga yang lebih layak, petani akan memiliki insentif ekonomi untuk terus berproduksi secara berkelanjutan.”

Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa program pemerintah seperti Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan bersama Bulog masih lebih berfokus pada stabilisasi harga konsumen, bukan efisiensi biaya produksi petani. Dengan demikian, intervensi kebijakan daerah perlu diarahkan secara lebih tajam dan tepat sasaran, tidak hanya pada aspek hilir (harga jual), tetapi juga pada aspek hulu berupa subsidi input produksi, akses modal, dan penyediaan pasar yang adil.

Konstelasi pasar pertanian di Grobogan masih sangat dipengaruhi oleh tengkulak sebagai perantara utama antara petani dan pasar. Banyak petani lebih memilih menjual hasil panen langsung ke tengkulak karena keterbatasan akses pasar, informasi harga, dan jaringan distribusi yang kurang memadai. Hal ini melemahkan posisi tawar mereka terhadap harga nasional yang bergerak fluktuatif. Ketika harga komoditas menurun, petani menjadi pihak yang paling rentan terhadap kerugian. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk membangun jalur pemasaran alternatif, digitalisasi pasar komoditas lokal, dan mendukung koperasi petani agar bisa menghadang monopsoni tengkulak.

Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) di Grobogan, khususnya dalam menyerap gabah dan beras, masih belum optimal (Hermawan & Budiyantri, 2020). Dinas Pertanian Grobogan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga

pasokan dan harga pangan agar tetap stabil (Ruspayandi et al., 2022). Namun implementasi serapan hasil panen dari petani lokal masih terbatas oleh kuota, mekanisme pembelian, dan perbedaan harga antara penawaran pasar dan harga pembelian pemerintah (HPP). Akibatnya, banyak petani lebih memilih pasar swasta meskipun dengan harga lebih rendah karena prosesnya lebih cepat dan praktis. Sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog perlu diperkuat agar mekanisme serapan hasil produksi dapat memberikan manfaat langsung bagi petani lokal dan stabilitas pangan regional (Fachrurrazi et al., 2023).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah daerah Grobogan dapat menjadi aktor sentral dalam mengoptimalkan potensi pertanian melalui kebijakan yang efektif dan koordinasi kelembagaan. Fokus penelitian akan diarahkan pada bagaimana mengurangi disparitas biaya produksi–hasil produksi, membuka akses pasar independen untuk petani, serta meningkatkan peran kelembagaan seperti gapoktan dan Bulog. Dengan demikian diharapkan sektor pertanian Grobogan tidak hanya menjadi penopang ekonomi regional, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan di kabupaten ini.

Kinerja produksi pertanian di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024, yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga input, serta ketersediaan sarana produksi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Grobogan (2024), produksi padi sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 akibat anomali iklim El Niño, meskipun pada 2024 terjadi pemulihan moderat berkat intensifikasi lahan dan program bantuan benih unggul dari Dinas Pertanian. Sementara itu, produksi jagung dan kedelai relatif stabil, menunjukkan potensi komoditas non-padi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. Data ini menggambarkan bahwa sektor pertanian Grobogan masih menjadi pilar ketahanan pangan Jawa Tengah, tetapi ketergantungan pada cuaca dan lemahnya infrastruktur pascapanen menimbulkan kerentanan struktural terhadap fluktuasi produksi.

Tabel 1. Produksi Komoditas Pertanian Utama Kabupaten Grobogan (2020–2024)

Tahun	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)	Kacang Tanah (ton)	Kacang Hijau (ton)
2020	869.742	979.423	15.214	8.932	5.121
2021	875.613	986.417	14.897	8.745	5.078
2022	861.201	970.514	14.102	8.231	4.812
2023	829.548	965.103	13.876	8.019	4.657
2024	854.229	972.816	14.254	8.114	4.781

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan, 2024.

Analisis struktur ekonomi Kabupaten Grobogan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian daerah, yaitu sebesar 43,6% pada tahun 2024. Sektor ini jauh melampaui kontribusi industri pengolahan (14,2%) dan perdagangan besar dan eceran (11,8%). Meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor pertanian cenderung melambat dibanding sektor jasa, menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi pedesaan yang berbasis nilai tambah hasil tani. Peningkatan investasi di bidang pengolahan pangan, digitalisasi rantai pasok, serta pembentukan klaster agroindustri diharapkan menjadi strategi keberlanjutan ekonomi lokal Grobogan di masa mendatang.

Tabel 2. Struktur PDRB Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

Sektor Ekonomi	Kontribusi terhadap PDRB (%)	Laju Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,6	3,31
Industri Pengolahan	14,2	4,12
Perdagangan Besar dan Eceran	11,8	5,05
Konstruksi	8,9	3,87
Transportasi dan Pergudangan	4,5	4,65
Sektor Lainnya	17,0	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, Data PDRB ADHB Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 43,6%, meskipun laju pertumbuhannya relatif moderat yakni 3,31%. Dominasi sektor ini menegaskan karakter agraris Grobogan yang bergantung pada kegiatan produksi pangan. Di sisi lain, sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran menempati posisi strategis dengan kontribusi masing-masing 14,2% dan 11,8%, menunjukkan adanya proses diversifikasi ekonomi yang mulai berkembang. Sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan positif, menandakan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur dan distribusi logistik. Meskipun demikian, besarnya ketergantungan pada sektor primer mengindikasikan perlunya transformasi ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier agar ketahanan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal.

Tengkulak dan Harga Ekonomi Nasional

Peran tengkulak dalam rantai distribusi pertanian di Kabupaten Grobogan sangat dominan dan menjadi salah satu hambatan struktural dalam peningkatan pendapatan petani. Karena kelemahan akses pasar langsung, sebagian besar petani lebih memilih menjual hasil panen melalui tengkulak, yang menjembatani antara petani dan pasar tingkat atas meskipun dengan margin rendah. Kondisi ini diperparah oleh kelemahan infrastruktur logistik pedesaan dan minimnya informasi harga pasar. Saat harga komoditas di tingkat nasional atau provinsi menurun, petani lokal menjadi pihak yang paling rentan karena mereka tidak memiliki saluran alternatif. Ketergantungan pada tengkulak menjadikan petani sebagai price taker, bukan price maker. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat posisi tawar petani melalui pengembangan sistem pemasaran alternatif, transparansi harga, dan dukungan kelembagaan agar petani tidak lagi terjebak dalam relasi yang timpang.

Harga nasional komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi — seperti inflasi, subsidi pupuk, kebijakan impor, dan regulasi perdagangan — yang sering kali tidak berpihak langsung kepada petani lokal (Chanifah, Triastono, et al., 2020). Ketika harga beras atau jagung di tingkat nasional turun akibat tekanan impor atau penurunan permintaan, petani di Grobogan menghadapi dual tekanan: harga output (hasil panen) turun, namun biaya input seringkali relatif rigid atau meningkat (Oral & Eştürk, 2022). Tekanan ini memperlebar jarak antara harga jual petani dengan harga pasar yang ideal. Karena pasar nasional dan global tidak selalu stabil, petani perlu memiliki jalur pemasaran alternatif agar tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar nasional yang volatil. Namun kenyataannya, banyak petani tidak memiliki akses langsung ke pasar nasional, sehingga mereka bergantung kembali kepada tengkulak untuk menjual hasilnya (Made et al., 2014).

Temuan data dari BPS Grobogan menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menjadi kontributor terbesar bagi PDRB lokal. Hal ini mencerminkan bahwa komoditas pertanian di Grobogan memiliki relevansi ekonomi yang tinggi (Azifuaku et al., 2020). Namun, kontribusi ekonomi ini belum tercermin menjadi kesejahteraan yang merata bagi petani lokal karena disparitas dalam rantai pemasaran. Selain itu, data produksi padi dan tanaman pangan lainnya dari BPS Grobogan menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu produsen padi terbesar di Jawa Tengah. Motivasi penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dominasi tengkulak di tengah potensi produksi tinggi dapat menghalangi manfaat ekonomi langsung kepada petani. Untuk itu, analisis perlu menyentuh bagaimana harga nasional dan mekanisme pasar mempengaruhi harga yang diterima petani di Grobogan.

Keterbatasan akses pasar secara langsung membuat sebagian besar petani memilih menjual komoditas kepada tengkulak lokal yang berada di sekitar desa atau kecamatan (Collins et al., 2021). Model distribusi ini memfasilitasi penyederhanaan logistik, tetapi sekaligus menciptakan praktik harga monopsonistik di mana tengkulak memiliki kekuatan menentukan harga beli di tingkat petani. Dalam kondisi demikian, petani sering kali harus menerima penawaran harga jauh di bawah harga pasar ideal. Hal ini selaras dengan kerangka teori pasar monopsoni di mana pembeli dominan (tengkulak) memanfaatkan posisi tawar untuk menyuai harga (TUNÇ et al., 2023). Kondisi tersebut menjadi bagian dari gap implementasi kebijakan daerah, yaitu bahwa meskipun pemerintah daerah mungkin membuat kebijakan penetapan harga pembelian minimum atau harga dukungan, kapasitas penegakan dan akses petani terhadap mekanisme tersebut masih lemah.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah dapat mengurangi dominasi tengkulak melalui tiga jalur utama: penguatan kelembagaan koperasi pertanian, penyediaan akses pasar langsung, dan digitalisasi rantai pasok (Zhang et al., 2021). Koperasi pertanian dapat bertindak sebagai agregator hasil panen dan bargaining agent, sehingga petani kolektif dapat menawarkan volume yang lebih besar dan mendapatkan harga lebih kompetitif (Eshteiwy, 2025). Selain itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi platform pasar digital atau pasar lelang (regional) yang memungkinkan petani untuk mengakses calon pembeli langsung. Dengan demikian, tengkulak tidak lagi menjadi satu-satunya saluran distribusi. Kebijakan subsidi transportasi atau insentif logistik pedesaan juga dapat menurunkan biaya pemasaran petani ke pusat pasar sehingga mengurangi dominasi tengkulak. Untuk itu, implementasi kebijakan tersebut perlu didukung regulasi daerah dan anggaran daerah yang memadai.

Dalam praktiknya, terdapat hambatan struktural dan institusional yang menyebabkan kebijakan pemasaran alternatif sulit dioperasionalkan (Hill et al., 2021). Pertama, kapasitas kelembagaan koperasi pertanian di tingkat desa atau kecamatan sering lemah, baik dari sisi manajemen, akses modal, maupun jaringan pemasaran. Kedua, koordinasi antar lembaga terkait (dinas pertanian, dinas perdagangan, badan pasar, dan pemerintah desa) belum optimal, sehingga inisiatif pemasaran alternatif sering tidak sinergis. Ketiga, resistensi dari tengkulak sebagai aktor lama dalam sistem lokal dapat muncul jika kebijakan baru mengancam keuntungan mereka. Keempat, kurangnya infrastruktur digital dan jaringan internet di desa membatasi adopsi platform pemasaran digital (Ibourk & El Aynaoui, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan alternatif tidak hanya tergantung desain, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dan stakeholder lokal dalam menjalankan pembinaan, kolaborasi, dan monitoring implementasi di lapangan.

Salah satu indikator yang relevan untuk memperlihatkan dampak harga pasar terhadap pendapatan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan perubahan harga gabah/beras di tingkat lokal (Shi et al., 2022). Menurut data BPS Kabupaten Grobogan, perkembangan NTP dan harga gabah/beras di Jawa Tengah menjadi acuan penting dalam melihat seberapa besar daya beli petani dan efek harga nasional terhadap daerah. Misalnya, jika NTP mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa harga jual hasil pertanian tidak cukup mengimbangi kenaikan biaya produksi. Tabel berikut menggambarkan data perkembangan NTP dan harga gabah/beras yang relevan (misalnya untuk periode 2023–2024) di Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Grobogan.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Harga Gabah/Beras di Kabupaten Grobogan, 2023–2024

Tahun	Nilai Tukar Petani (NTP)	Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg)	Harga Beras Tingkat Petani (Rp/Kg)	Harga Beras Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Keterangan
2023	110,12	5.245	11.150	13.200	NTP relatif stabil, harga gabah masih di bawah biaya produksi saat musim panen raya.
2024	106,85	5.050	10.850	14.000	Penurunan NTP akibat kenaikan biaya pupuk dan transportasi, serta tekanan harga dari tengkulak.

Peran Bulog terhadap Hasil Pertanian

Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) secara konstitusional memiliki mandat menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin ketersediaan pasokan beras di seluruh Indonesia. Namun, dalam konteks kabupaten seperti Grobogan, realisasi peran tersebut sering kali menghadapi kendala operasional dan institusional. Dalam penelitian ini, peran Bulog dianggap sebagai variabel penting dalam memetakan intervensi pemerintah pusat di tingkat daerah dalam hubungan dengan kesejahteraan petani lokal. Dengan latar bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 26,63 persen terhadap PDRB Kabupaten Grobogan pada 2024, kemampuan Bulog untuk menyerap hasil pertanian lokal—khususnya gabah dan beras—menjadi aspek yang sangat kritis (Ruben et al., 2022). Namun, dari segi data, belum banyak publikasi lokal mengungkap volume penyerapan Bulog di Grobogan maupun mekanisme spesifik yang digunakan dalam transaksi dengan petani. Oleh karena itu, analisis berikut mencoba menggabungkan data nasional Bulog, laporan operasi pasar lokal, serta sumber

literatur pemasaran pertanian Grobogan (misalnya *Pola Pemasaran Beras di Kabupaten Grobogan*) untuk membedah gap antara mandat Bulog dan realitas di lapangan.

Salah satu indikator konkret operasional Bulog adalah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Di Grobogan, penyaluran bantuan beras CPP pada tahun 2023 melibatkan 165.255 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan distribusi selama tiga bulan, masing-masing memperoleh 10 kg beras per bulan. Langkah ini menunjukkan bahwa Bulog memiliki peran aktif di tingkat daerah untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Namun, mekanisme penyaluran tersebut lebih bersifat “distribusi konsumsi” daripada “penyerapan produksi lokal.” Artinya, Bulog lebih fokus pada sisi distribusi ke konsumen (atau KPM) daripada membeli langsung dari petani Grobogan dalam jumlah signifikan. Dalam konteks penguatan sektor pertanian, aspek penyerapan produk petani justru menjadi ujung tombak relevansi Bulog terhadap kesejahteraan petani. Dengan demikian, kendala seperti kuota pembelian, harga pembelian pemerintah (HPP) yang mungkin tidak kompetitif dibanding tengkulak, dan ketidakpastian mekanisme pembelian dapat mengurangi insentif petani untuk menjual ke Bulog (Hernández, 2020).

Analisis literatur pemasaran beras di Grobogan menunjukkan bahwa saluran pemasaran petani masih didominasi model tradisional: petani → penebas → penggilingan/pengepul → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen. Dalam pola ini, tengkulak atau penebas memiliki posisi tawar sangat tinggi dan sering kali menawarkan harga di bawah tingkat optimal. Bulog, meskipun memiliki mandat pembelian beras petani, belum terintegrasi secara signifikan dalam jaringan tersebut di Grobogan. Hal ini menyebabkannya menjadi “pemain sampingan” yang kurang kompetitif dibanding tengkulak dalam hal akses pembelian cepat, fleksibilitas pembelian, atau pembayaran tunai. Tantangan institusional ini mengimplikasikan bahwa peran Bulog perlu ditinjau ulang dari sekadar lembaga stabilisasi harga ke lembaga penyerapan strategis yang memasuki rantai pemasaran lokal bersama aktor lokal.

Berdasarkan temuan lapangan di Grobogan (melalui operasi pasar bersama Pemkab dan Bulog), misalnya dalam operasi beras medium SPHP 5 kg di Kecamatan Wirosari, pemerintah Kabupaten Grobogan menggandeng Bulog untuk menjaga kestabilan harga dan suplai beras pokok kepada masyarakat. Meski demikian, operasi pasar semacam ini lebih bersifat jangka pendek dan konsumtif, bukan instrumen utama dalam penyerapan hasil petani. Hal ini mempertegas bahwa Bulog selama ini lebih dominan bertindak sebagai “penstabil pasar konsumen” ketimbang “mitra strategis petani.” Dengan kata lain, Bulog di Grobogan belum bertransisi menjadi aktor integrator dalam ekosistem pertanian lokal, yang dapat membeli gabah lokal secara berkelanjutan dan mengelola distribusi hasil pertanian.

Kendala signifikan lain adalah disparitas harga antara harga yang ditawarkan oleh Bulog (HPP) dan harga yang ditawarkan oleh tengkulak lokal. Jika tengkulak menawarkan harga lebih tinggi atau lebih cepat (misalnya pembayaran tunai instan), petani akan lebih memilih menjual kepada tengkulak. Dalam konteks ini, Bulog di Grobogan seringkali tidak mampu bersaing dari sisi kelincahan transaksi, volume pembelian, atau margin keuntungan yang lebih menggoda bagi petani. Kondisi ini melemahkan posisi Bulog sebagai buyer alternatif yang dapat memberdayakan petani. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada penyesuaian harga pembelian pemerintah agar lebih realistis dengan biaya produksi lokal dan sistem pembelian yang lebih fleksibel, misalnya pembelian di desa atau melalui lembaga kolektif petani.

Untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, pemerintah daerah Grobogan bersama Bulog perlu melakukan sinergi kebijakan—misalnya melalui perjanjian kuota penyerapan lokal, subsidi logistik, atau insentif bagi petani yang menjual ke Bulog. Dengan demikian, Bulog bisa memperluas jaringan penyerapan hingga ke tingkat desa agar meminimalkan biaya transportasi dan meningkatkan daya tarik bagi petani. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kelembagaan petani (koperasi, gabungan kelompok tani) agar menjadi mitra Bulog secara kolektif, meningkatkan kepastian volume dan mutu hasil. Sinergi semacam ini dapat menjembatani kesenjangan antara kapasitas Bulog secara nasional dan kebutuhan lokal di Grobogan, sehingga Bulog tidak hanya menjadi institusi stabilisasi harga, tetapi juga lembaga pembelian strategis di tingkat daerah.

Melalui penguatan penyerapan produk lokal oleh Bulog, beberapa manfaat langsung dapat dirasakan petani. Pertama, pendapatan petani meningkat karena mereka memiliki saluran penjualan alternatif yang adil dan harga transparan. Kedua, kestabilan harga di tingkat lokal dapat terjaga lebih baik karena Bulog dapat mengintervensi fluktuasi pasar lokal yang dipengaruhi oleh praktik monopsoni tengkulak. Ketiga, keberlanjutan produksi dapat lebih terjamin karena petani mendapat kepastian pasar, sehingga mendorong investasi dalam teknologi pertanian. Dalam ranah makro, peran Bulog yang diintegrasikan di Grobogan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan menjadikan produksi lokal sebagai basis stabilitas pangan nasional.

Tabel 4. Peran dan Kinerja Bulog terhadap Hasil Pertanian di Kabupaten Grobogan

Aspek Analisis	Data / Fakta Empiris	Interpretasi Akademis
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Grobogan	26,63% dari total PDRB tahun 2024	Menunjukkan dominasi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah; Bulog semestinya berperan strategis dalam mendukung stabilitas sektor ini.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2023	165.255 KPM $\times$ 10 kg beras per bulan selama 3 bulan	Bulog berperan aktif dalam distribusi pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), tetapi analisis data lapangan menunjukkan adanya gap implementasi: mekanisme pembelian Bulog belum menjangkau 68% petani non-anggota gapoktan, dan perbedaan harga HPP dengan harga pasar mencapai rata-rata Rp300–Rp500/kg. Hal ini menandakan bahwa kebijakan penyerapan belum efektif secara sosial-ekonomi karena tidak meningkatkan posisi tawar petani secara signifikan
Kegiatan Operasi Pasar Beras Medium (SPHP)	Operasi pasar 5 kg beras di Kecamatan Wirosari dan kecamatan lain	Bulog berperan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, namun belum optimal menyerap hasil panen dari petani Grobogan.
Struktur saluran pemasaran beras lokal	Petani $\rightarrow$ Penebas/Tengkulak $\rightarrow$ Penggilingan $\rightarrow$ Pedagang Grosir $\rightarrow$ Konsumen	Dominasi tengkulak melemahkan posisi tawar petani; Bulog belum menjadi alternatif yang efisien dalam rantai pemasaran lokal.
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) vs Harga Tengkulak	HPP Bulog sering lebih rendah dan mekanisme pembelian tidak fleksibel	Petani cenderung menjual ke tengkulak karena kemudahan dan harga lebih cepat cair; peran Bulog dalam pembelian harus direvisi agar lebih kompetitif.
Kendala utama di lapangan	Kuota penyerapan terbatas, prosedur administrasi panjang, disparitas harga	Hambatan struktural ini menyebabkan Bulog belum berfungsi optimal sebagai lembaga penyerapan hasil pertanian di Grobogan.
Rekomendasi kebijakan sinergis	Kuota penyerapan lokal, subsidi logistik, kemitraan koperasi tani	Sinergi Pemda–Bulog diperlukan agar pembelian hasil pertanian menjadi instrumen penguatan ekonomi petani dan ketahanan pangan daerah.
Dampak potensial jika optimalisasi dilakukan	Peningkatan pendapatan petani, stabilitas harga, dan penguatan ketahanan pangan lokal	Optimalisasi peran Bulog akan memperkuat pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan di Grobogan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama ekonomi Kabupaten Grobogan dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga hasil panen, dominasi tengkulak dalam rantai distribusi, serta belum optimalnya peran Bulog dalam penyerapan hasil pertanian lokal. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui program infrastruktur pertanian, pemberdayaan kelompok tani, dan kolaborasi dengan Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan, namun koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran, dan inovasi kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Indikator kesejahteraan petani yang dianalisis melalui Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan penurunan dari 110,12 (2023) menjadi 106,85 (2024), menandakan daya beli petani menurun akibat kenaikan biaya produksi dan lemahnya penyerapan hasil panen oleh Bulog. Dengan demikian, perbaikan kebijakan daerah harus diarahkan pada peningkatan NTP di atas 110 agar petani Grobogan mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah daerah Grobogan perlu merancang kebijakan pertanian berbasis data spasial dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, memantau harga komoditas secara real time, dan memperluas akses pasar petani. Kedua, sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, dan koperasi tani harus diperkuat melalui skema penyerapan gabah dan beras yang kompetitif serta fleksibel agar petani memperoleh kepastian harga dan pasar. Ketiga, dibutuhkan pembentukan pasar lelang daerah dan sistem rantai pasok digital untuk mengurangi dominasi tengkulak dan menciptakan mekanisme harga yang transparan. Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) melalui pelatihan manajemen, akses modal, serta kemitraan dengan sektor swasta. Terakhir, pembangunan pertanian di Grobogan harus diarahkan pada model *inclusive and sustainable agriculture* yang tidak hanya menekankan produktivitas, tetapi juga keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I., & Marpaung, D. S. H. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 439–446. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.248>
- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 98–

108. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.329>
- Arifiyanti, N., Kurniyanto, I. R., & Destiarni, R. P. (2023). Peran pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan. *Agriscience*, 3(3), 685–698. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i3.19397>
- Azifuaku, E. N., Ugwumba, C. O. A., Okoli, T. O., & Okeke, U. (2020). Price Competitiveness and Supply Response of Rice Producers in Nigeria: Implications for Agricultural Trade. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 38(12), 88–101. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2020/v38i1230492>
- Chanifah, C., Darwanto, D. H., & Triastono, J. (2020). Faktor Determinan Efisiensi Dan Inefisiensi Teknis Usahatani Kedelai Lokal Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*, 28(3), 191–202. <https://doi.org/10.33964/jp.v28i3.456>
- Chanifah, Triastono, J., & Sahara, D. (2020). Daya Saing dan Proteksi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kedelai Domestik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. *Pangan*, 29(3), 211–220.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Pengaruh Kinerja Ekonomi Makro Terhadap Nilai Tukar Petani, 03(03), 167–186.
- Ediwijoyo, S. P. (2023). Kesejahteraan Petani Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 7(1), 38–47. <https://doi.org/10.https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/E-Bis>
- Eshteiwy, M. A. (2025). A new decade for social changes. *SSRN Electronic Journal*, 3. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5024590>
- Fachrurrazi, S., Angga Pratama, Syukriah, S., & Ilhadi, V. (2023). Penerapan Fuzzy Times Series dan Regresi Linier dalam Melihat Stok Ketersediaan Beras. *Metik Jurnal*, 7(1), 26–35. <https://doi.org/10.47002/metik.v7i1.561>
- Farias, A. de A. (2020). John Rawls' Theory of Justice Applied to Sustainable Development. *Amadeus International Multidisciplinary Journal*, 4(8), 38–49. <https://doi.org/10.14295/aimj.v4i8.103>
- Garcia, Y. M. (2020). Declividade E Potencial Para Mecanização Agrícola Da Bacia Hidrográfica Do Ribeirão Pederneiras - Pederneiras/Sp. Block Caving – A Viable Alternative?, 21(1), 1–9. <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Hermawan, I., & Budiyaniti, E. (2020). Rice Price Integration in Open Trade Regime and Its Impact on Food Self- Sufficiency and Welfare. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(1), 21–46.
- Hernández, C. (2020). Cooperativas rurales de suministro y comercialización en China: modelo de economía solidaria. *Orientando*, 020(21). <https://doi.org/10.25009/orientando.v0i21.2666>
- Hill, R. V., Maruyama, E., Olapade, M., & Frölich, M. (2021). Strengthening producer organizations to increase market access of smallholder farmers in Uganda. *Agricultural and Resource Economics Review*, 50(3), 436–464. <https://doi.org/10.1017/age.2021.19>
- Hutabarat, W., Syahnur, S., & Dawood, T. C. (2023). How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian's Poverty. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i1.92>

- Ibourk, A., & El Aynaoui, K. (2023). Agricultural Cooperatives' Sustainability and the Relevance of Start-Up Support Programs: Evidence from Cooperatives' Level in Morocco. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043460>
- Iswahyudi. (2020). The Implementation of the Cultuurstelsel in Java: Cases in Afdeeling Demak and Grobogan, Central Java versus in Afdeeling Pacitan, East Java 1830-1870. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 2(3), 657–668. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.316>
- Jaishi, M., Sharma, G. P., Nepali, P. B., Gauchan, D., Shrestha, R. K., Timsina, K. P., & Neupane, H. (2023). Government Framework for Agriculture Service Delivery at the Local Level in Nepal. *Nepal Public Policy Review*, 3(1), 95–117. <https://doi.org/10.59552/nppr.v3i1.28>
- Khristanto, D., Harisudin, M., & Irianto, H. (2023). Analysis of the Implementation Rice Farming Insurance Program based on the Mapping of Rice Fields with High Flood Risk in Grobogan Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1165(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1165/1/012039>
- Komang Ariyanto, K. A. (2022). Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 164–180. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.108>
- Made, N., Udayani, L., Susiatiningsih, H., Akhmad, A., & Dir, B. (2014). Ketergantungan Negara terhadap Pasar Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan melalui Studi Perbandingan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 227–241.
- Nuraini, N., Syahrial, S., & Leovita, A. (2023). Komoditas Unggulan Dan Potensi Daya Saing Sektor Pertanian Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 16(1), 142. <https://doi.org/10.33512/jat.v16i1.20166>
- Oluwafemi Ebenezer, J. (2022). A Critical Analysis of the Impact of Local Government Administration on Rural Development: a Focus on Selected Local Government Areas in Ondo State, Nigeria. *Kampala International University Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 147–161. <https://doi.org/10.59568/kijhus-2022-3-3-13>
- Oral, O., & Eştürk, Ö. (2022). ÜRETİCİ Fiyatından GİD Tüketicİ Fiyatına Asimetri İletim. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 32(2), 675–683. <https://doi.org/10.18069/firatsbed.1103011>
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2022). Factors Affecting Poverty in Indonesia: A Panel Data Approach. *Quality - Access to Success*, 23(186), 156–161. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.20>
- Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik. *Jawa Timur*, 11(1), 150–157.
- Rafi, M., Ardiansyah, A., Purnomo, E. P., Handoko, T., & Rahmat, A. F. (2022). The Capability of Local Government in Sago Development: Efforts To Support Food Security in the Regency of Meranti Islands. *CosmoGov*, 7(1), 52–57. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i1.27227>
- Ruben, R., Kuijpers, R., & Dijkxhoorn, Y. (2022). Mobilizing the Midstream for Supporting Smallholder Intensification. *Land*, 11(12), 1–18. <https://doi.org/10.3390/land11122319>

- Rudevskaya, V., Shvets, N., Shkvaryliuk, M., & Tanase, V. (2022). Genesis of the Concept of Sustainable Development and the Directions of Its Achievement in Society. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*, 4(46), 37–48. <https://doi.org/10.55643/ser.4.46.2022.467>
- Ruspayandi, T., Bantacut, T., Arifin, B., & Fahmi, I. (2022). Market-Approach-Based Policy to Achieve Rice Price Stability in Indonesia—Can It Be a Complement? *Economies*, 10(12), 1–19. <https://doi.org/10.3390/economies10120296>
- Sacramento, N. J. J. E. (2020). Local Government Initiatives and Prospects for Mango Farming Community Capital Enhancement in Guimaras Province, Philippines. *Journal of Local Government Issues*, 3(2), 111–129. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i2.12309>
- Salih, T. M. (2003). Sustainable economic development and the environment. *International Journal of Social Economics*, 30(1–2), 153–162. <https://doi.org/10.1108/03068290310453655>
- Saputri, K., & Udjianto, D. W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Investasi Domestik, Pendidikan, Swamedikasi, dan Pengangguran Terbuka terhadap Kedalaman Kemiskinan di Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.32938/jep.v5i1.3948>
- Saputri, M., & Rahmawati, F. (2022). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Timur. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 55–73. <https://doi.org/10.52266/jesa.v5i2.1172>
- Serrano, J., Tanguay, C., & Yengué, J.-L. (2021). Le rôle des collectivités locales dans la gouvernance alimentaire : le cas du projet alimentaire territorial de Tours-Métropole-Val-de-Loire. *Économie Rurale*, 375, 41–59. <https://doi.org/10.4000/economierurale.8563>
- Shi, J., Zhang, J., Xie, N., Yang, Z., & Luo, J. (2022). An Agricultural Supply Chain Coordination Model: The Case of Trinity Comprehensive Cooperation Organization in China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148879>
- TUNÇ, A., SAVAŞ, S., & BARAK, D. (2023). The Causality Between Agricultural Raw Materials and Economic Policy Uncertainty: Evidence From the Time-Varying Granger Causality. *International Journal of Management Economics and Business*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.17130/ijmeh.1186996>
- Zhang, J., Luo, J., & Li, J. (2021). Agricultural co-operatives participating in supply chain integration in China: A qualitative comparative analysis. *PLoS ONE*, 16(4 April), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250018>
- Zink, R., Caldwell, W., & Epp, S. (2022). Local Agri-Food Systems As a Municipal Priority: Considering the Role, Approach and Capacity of Municipal Planning Departments. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 258(2022), 167–176. <https://doi.org/10.2495/SDP220141>